



Modal Sosial dan Perilaku Pro-Lingkungan pada Wisata Pesisir Pohuwato: *Literature Review* (*Social Capital and Pro-Environmental Behavior in Pohuwato Coastal Tourism: Literature Review*)

Sitti Mutiah Rahman¹, Wawan K. Tolinggi², Irwan Bempah³

^{1,2,3}Magister Kependudukan dan Lingkungan Hidup, Universitas Negeri Gorontalo
tiarahman897@gmail.com¹, wawan.tolinggi@ung.ac.id², irwanbempah@ung.ac.id³

Article Info	Abstract
<p>Article history: Received: 7 Mei 2026 Revised: 11 Juni 2026 Accepted: 12 Juni 2026</p>	<p>Coastal tourism in Pohuwato Regency has significant potential to support community economic development, while also requiring environmental management that involves active community participation. This article aims to examine the role of social capital in encouraging pro-environmental behavior in coastal tourism areas, particularly at Pohon Cinta Beach. The study employed an integrative literature review method. A thematic search across Google Scholar, the SINTA portal, and Garuda for the 2021–2026 period yielded around 60 records, which were screened and reduced to 22 peer-reviewed national and international journal articles, supplemented by several seminal theoretical sources on social capital, environmental sociology, and coastal tourism governance. The results indicate that trust plays a role in strengthening collective action and supporting the acceptance of community-based environmental programs. Social norms derived from local wisdom and religious values also shape informal environmental control mechanisms. In addition, social networks involving Pokdarwis (tourism groups), village institutions, NGOs, and universities contribute to expanding community access to knowledge, cooperation, and resources to support environmental management. The reviewed literature also indicates several aspects that need to be strengthened, such as increasing environmental literacy, strengthening inter-institutional coordination, optimizing funding support, and developing more integrated management mechanisms. Therefore, strengthening social capital through the utilization of local wisdom, developing institutional collaboration, and increasing community environmental literacy are important parts in supporting sustainable coastal tourism management in Pohuwato Regency.</p>
<p>Keywords: <i>Social Capital</i> <i>Pro-environmental behavior</i> <i>Coastal tourism</i> <i>Literature review</i> <i>Pohuwato</i></p>	
<p>Kata Kunci: Modal sosial Perilaku pro-lingkungan Wisata pesisir Tinjauan Pustaka Pohuwato</p>	
	<p>Abstrak</p> <p>Wisata pesisir di Kabupaten Pohuwato memiliki potensi yang besar dalam mendukung perkembangan ekonomi masyarakat, sekaligus memerlukan pengelolaan lingkungan yang melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif. Artikel ini bertujuan mengkaji peran modal sosial dalam mendorong perilaku pro-lingkungan pada kawasan wisata pesisir, khususnya di Pantai Pohon Cinta. Penelitian menggunakan metode <i>integrative literature review</i> dengan menelusuri literatur secara tematik melalui Google Scholar, portal SINTA, dan Garuda untuk rentang 2021–2026. Penelusuran awal menghasilkan sekitar 60 rekaman yang kemudian disaring dan dipersempit menjadi 22 artikel jurnal nasional dan internasional yang ditinjau sejawat, dilengkapi beberapa sumber teoretis utama tentang modal sosial, sosiologi lingkungan, dan tata kelola wisata pesisir. Hasil kajian menunjukkan bahwa kepercayaan berperan dalam memperkuat tindakan kolektif dan mendukung penerimaan program</p>

lingkungan berbasis komunitas. Norma sosial yang tumbuh dari kearifan lokal dan nilai-nilai keagamaan turut membentuk mekanisme pengendalian lingkungan secara informal. Selain itu, jaringan sosial yang melibatkan Pokdarwis, kelembagaan desa, LSM, dan perguruan tinggi berkontribusi dalam memperluas akses masyarakat terhadap pengetahuan, kerja sama, dan sumber daya pendukung pengelolaan lingkungan. Literatur yang ditelaah juga menunjukkan adanya beberapa aspek yang perlu diperkuat, seperti peningkatan literasi lingkungan, penguatan koordinasi antar kelembagaan, optimalisasi dukungan pendanaan, serta pengembangan mekanisme pengelolaan yang lebih terpadu. Oleh karena itu, penguatan modal sosial melalui pemanfaatan kearifan lokal, pengembangan kolaborasi kelembagaan, dan peningkatan literasi lingkungan masyarakat menjadi bagian penting dalam mendukung tata kelola wisata pesisir yang berkelanjutan di Kabupaten Pohuwato.

Corresponding Author:

Sitti Mutiah Rahman
Pascasarjana
Universitas Negeri Gorontalo
tiarahman897@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara maritim dengan garis pantai yang sangat panjang sehingga memiliki peluang besar dalam pengembangan pariwisata pesisir. Kawasan pesisir tidak hanya berperan sebagai ruang ekologis yang menopang ekosistem mangrove, pantai, dan perairan laut, tetapi juga sebagai ruang sosial-ekonomi yang mempertemukan masyarakat lokal, pelaku usaha, serta pemerintah daerah. Pariwisata pesisir kerap diposisikan sebagai sektor strategis karena mendorong penciptaan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Namun, manfaat ekonomi tersebut perlu diimbangi dengan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, mengingat aktivitas pariwisata yang tidak terkelola berpotensi menimbulkan peningkatan sampah plastik, abrasi pantai, dan kerusakan vegetasi pesisir (Septianda, 2023; Tuhumury & Kaliky, 2019).

Pantai Pohon Cinta di Kabupaten Pohuwato merupakan salah satu destinasi wisata pesisir penting di Provinsi Gorontalo. Kajian terdahulu menunjukkan bahwa kawasan ini memiliki daya tarik berupa keindahan panorama pantai, jembatan ikon wisata, ragam kuliner pesisir, serta potensi ekowisata mangrove. Penelitian terkait Pantai Pohon Cinta umumnya menitikberatkan pada penataan kawasan, persepsi pengunjung, ketersediaan fasilitas, dan strategi pengembangan ekowisata (Boekoesoe et al., 2023; Kurniawati, 2023; Riadi & Botutihe, 2021). Namun, kajian-kajian tersebut masih menyisakan ruang untuk mengeksplorasi peran kekuatan sosial masyarakat dalam mendorong perilaku yang berorientasi pada kelestarian lingkungan.

Perilaku pro-lingkungan merujuk pada tindakan sadar individu maupun kelompok untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya alam (Kollmuss & Agyeman, 2002; Stern, 2000). Dalam kajian sosiologi lingkungan, perilaku tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh faktor individu, tetapi juga dibentuk oleh relasi sosial, nilai-nilai bersama, dan norma kolektif. Perspektif New Ecological Paradigm memandang manusia sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem ekologis (Catton et al., 1980). Dalam konteks ini, Wan dan Du (2022) menemukan bahwa modal sosial yang diukur dari aspek kepercayaan, norma, jaringan, dan partisipasi sosial secara signifikan mendorong perilaku pro-lingkungan baik di ranah privat maupun publik.

Konsep modal sosial menjadi relevan untuk menjelaskan keterkaitan antara aspek sosial dan perilaku lingkungan. Putnam (1993) mendefinisikan modal sosial sebagai jaringan, norma, dan kepercayaan yang memungkinkan koordinasi serta kerja sama kolektif, sementara Fukuyama (2001) menekankan kepercayaan dan nilai-nilai bersama sebagai fondasi kerja sama efektif. Dalam konteks wisata pesisir, modal sosial dapat mendorong tindakan kolektif seperti kegiatan bersih pantai, pengelolaan sampah, pelestarian mangrove, dan penguatan kolaborasi antarpemangku kepentingan. Auliah et al. (2025) menegaskan bahwa modal sosial komunitas dan aksi kolektif berperan krusial dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan. Penelitian Luo et al. (2025) pada komunitas wisata pedesaan juga memperlihatkan bahwa tindakan kolektif yang berakar pada modal sosial menjadi penopang utama daya adaptasi komunitas ketika menghadapi krisis. Gorontalo sendiri memiliki nilai lokal Huyula atau gotong royong yang berpotensi memperkuat praktik pro-lingkungan tersebut.

Berbagai penelitian menunjukkan kontribusi modal sosial dalam pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat. Mellyna et al. (2025) mengungkapkan peran kepercayaan, norma, dan jejaring sosial dalam pengelolaan Pantai Karang Jahe. Ningtias et al. (2025) menegaskan bahwa jaringan sosial dan kepercayaan menjadi kekuatan utama dalam pengembangan Pantai Raja Kecil. Delisa et al. (2024) menunjukkan kontribusi modal sosial terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Abdullah dan Rahmatiah, (2026) menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan di Gorontalo masih didukung oleh gotong royong serta kontrol sosial informal. Meskipun demikian, belum ada kajian *literature review* yang secara khusus menyintesis hubungan antara modal sosial dan perilaku pro-lingkungan dalam konteks wisata pesisir di Pohuwato. Mengisi kesenjangan ini penting bukan semata untuk kepentingan akademik. Sintesis yang terstruktur dapat menjadi rujukan bagi pemerintah daerah dan pengelola destinasi dalam merancang kebijakan pengelolaan lingkungan yang berakar pada kekuatan sosial masyarakat, sekaligus membantu Pokdarwis dan kelembagaan desa mengenali modal sosial yang sudah dimiliki sebagai dasar praktik pelestarian lingkungan yang lebih berkelanjutan. Kesenjangan inilah yang menjadi landasan utama penyusunan artikel ini.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, artikel ini bertujuan untuk: (1) mensintesis berbagai hasil penelitian terkait hubungan antara modal sosial dan perilaku pro-lingkungan dalam konteks wisata pesisir; (2) mengidentifikasi peran kepercayaan, norma, dan jaringan sosial dalam mendorong perilaku pro-lingkungan; serta (3) mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat serta merumuskan implikasi konseptual bagi penguatan tata kelola wisata pesisir berkelanjutan di Kabupaten Pohuwato

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan *literature review* dengan tipe *integrative review*. Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada tujuan kajian yang tidak berfokus pada penyajian temuan empiris baru, melainkan pada upaya mengintegrasikan, membandingkan, serta menafsirkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan modal sosial, perilaku pro-lingkungan, dan tata kelola wisata pesisir. Melalui *integrative review*, penulis dapat memanfaatkan beragam jenis sumber, baik konseptual maupun empiris, sehingga memungkinkan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap isu yang dikaji (Snyder, 2019).

Sumber data terdiri atas artikel jurnal nasional dan internasional, buku referensi teoretis, serta dokumen akademik lain yang relevan. Penelusuran literatur dilakukan pada periode Maret hingga Mei 2026 untuk artikel yang terbit dalam rentang waktu 2021–2026, dengan pengecualian terhadap sejumlah sumber teoretis klasik (seperti Putnam, Ostrom, dan Stern) yang tetap disertakan karena perannya sebagai landasan konseptual. Penelusuran dilakukan melalui basis data *Google Scholar*, portal SINTA, dan Garuda secara tematik dengan kata kunci yaitu modal sosial, perilaku pro-lingkungan, wisata pesisir, pengelolaan lingkungan, Huyula, Pokdarwis, Pantai Pohon Cinta, dan Pohuwato, serta padanan bahasa Inggrisnya seperti *social capital*, *pro-environmental behavior*, dan *coastal tourism*. Untuk menjamin validitas sumber, penelitian ini memprioritaskan literatur yang memiliki identitas akademik jelas, seperti DOI, indeksasi SINTA, atau metadata bibliografis lainnya. Literatur yang tidak secara langsung membahas modal sosial misalnya kajian terkait arsitektur atau fasilitas kawasan tetap dimanfaatkan sebagai sumber pendukung konteks destinasi, namun tidak dijadikan landasan utama penarikan kesimpulan teoretis.

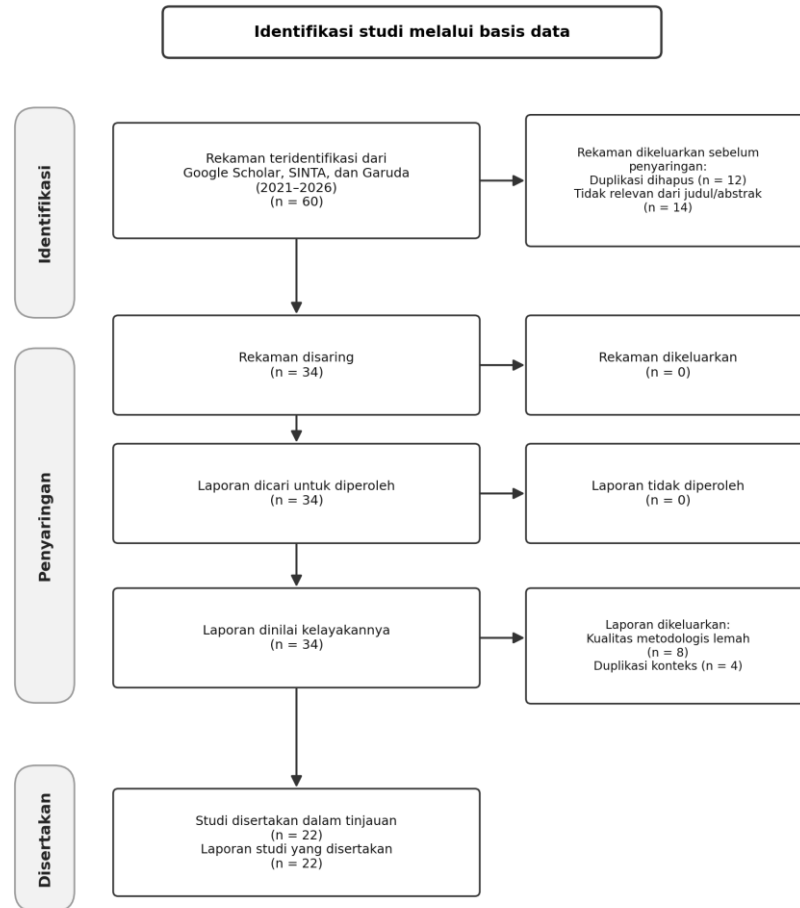
Kriteria inklusi meliputi: (1) artikel yang membahas modal sosial, partisipasi masyarakat, perilaku pro-lingkungan, atau pengelolaan wisata pesisir; (2) artikel yang memiliki relevansi dengan konteks komunitas lokal, destinasi wisata, atau pengelolaan lingkungan; (3) artikel yang menyajikan informasi metodologis serta temuan yang memungkinkan perbandingan; dan (4) khusus untuk referensi tahun 2025–2026, keabsahan metadata seperti volume, halaman, dan DOI diverifikasi melalui laman resmi jurnal, SINTA, atau penerbit. Literatur yang tidak memiliki keterkaitan substansial dengan topik atau tidak didukung informasi bibliografis memadai tidak disertakan dalam sintesis utama.

Proses penyaringan literatur mengikuti alur identifikasi, penyaringan, dan pemilihan akhir. Penelusuran awal pada ketiga basis data menghasilkan sekitar 60 rekaman. Setelah penghapusan duplikasi dan penyaringan berdasarkan judul serta abstrak, tersisa 34 artikel yang dinilai relevan. Penilaian teks lengkap kemudian dilakukan terhadap artikel-artikel tersebut dengan mengacu pada kriteria inklusi, sehingga diperoleh 22 artikel jurnal yang ditinjau sejawat sebagai dasar utama sintesis. Hanya artikel yang diterbitkan pada jurnal dengan proses tinjauan sejawat yang dimasukkan ke dalam sintesis utama, sedangkan buku teoretis klasik dan dokumen kebijakan hanya digunakan sebagai sumber pendukung. Untuk menjaga mutu, setiap artikel dinilai secara sederhana menggunakan instrumen penilaian kualitas yang disesuaikan dengan beragam metode (mengacu pada prinsip *Mixed Methods Appraisal Tool*), dengan memperhatikan kejelasan tujuan, kememadai metode, serta kesesuaian antara temuan dan kesimpulan. Artikel dengan kualitas metodologis yang sangat lemah tidak dijadikan dasar penarikan kesimpulan teoretis.

Proses analisis dilakukan melalui tiga tahapan. Pertama, literatur dipetakan berdasarkan fokus kajian, pendekatan metodologis, konteks penelitian, serta temuan utama. Kedua, hasil-hasil penelitian dikelompokkan ke dalam tiga dimensi utama modal sosial, yaitu kepercayaan, norma, dan jaringan sosial. Ketiga, dilakukan

sintesis interpretatif untuk mengaitkan temuan-temuan tersebut dengan isu perilaku pro-lingkungan dalam konteks wisata pesisir di Pohuwato.

Untuk menjaga validitas kajian, penelitian ini menerapkan konsistensi dalam penggunaan kriteria inklusi, mengutamakan sumber yang dapat ditelusuri, melakukan perbandingan antarhasil penelitian, serta membedakan secara jelas antara temuan literatur dan rumusan konseptual penulis. Keseluruhan tahapan identifikasi, penyaringan, dan pemilihan akhir literatur diringkas dalam diagram alur pada Gambar 1.



Gambar 1. Diagram alur identifikasi, penyaringan, dan pemilihan literatur (sampel akhir n = 22)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pemetaan Literature Terdahulu

Kajian literatur menunjukkan bahwa penelitian terkait Pantai Pohon Cinta telah berkembang, namun secara umum masih banyak berfokus pada aspek fisik kawasan, ketersediaan fasilitas, penataan ruang, desain akomodasi, serta tingkat kepuasan pengunjung. Dalam konteks ini, Boekoesoe et al. (2023) digunakan sebagai rujukan yang menggambarkan perencanaan fasilitas pariwisata berbasis arsitektur tropis di kawasan Pantai Pohon Cinta. Literatur tersebut memberikan kontribusi dalam menjelaskan dinamika perkembangan fisik kawasan, tetapi tidak digunakan sebagai dasar utama dalam pembahasan mengenai modal sosial. Sisi lain, kajian yang secara langsung menghubungkan modal sosial dengan perilaku pro-lingkungan masyarakat pada wisata pesisir di Pohuwato masih belum banyak ditemukan.

Berdasarkan kondisi tersebut, artikel ini menggunakan dua kelompok literatur sebagai dasar analisis. Kelompok pertama mencakup literatur yang secara khusus membahas Pantai Pohon Cinta serta pengembangan wisata pesisir di Gorontalo. Kelompok kedua terdiri atas literatur pembandingan yang mengkaji modal sosial, partisipasi masyarakat, pengelolaan lingkungan, *environmental governance*, serta pengembangan wisata pesisir dalam berbagai konteks yang relevan. Dalam hal ini, pendekatan tata kelola lingkungan yang dikemukakan oleh Rahman et al. (2025) memberikan kerangka konseptual tambahan untuk memahami bahwa pengelolaan lingkungan yang melibatkan sinergi antara pemerintah, mekanisme pasar, dan partisipasi masyarakat dapat menjadi dasar penting dalam mendukung keberlanjutan wisata pesisir.

Tabel 1. Matriks Literatur Terdahulu yang Disintesis

Sumber	Konteks	Fokus Kajian	Relevansi
Boekoesoe et al. (2023)	Pantai Pohon Cinta	Rancangan hotel resort dan arsitektur tropis	Rujukan kontekstual pengembangan fisik kawasan; tidak dijadikan dasar utama analisis modal sosial.
Riadi dan Botutihe (2021)	Pantai Pohon Cinta	Prediksi kepuasan pengunjung	Kebersihan dan kualitas layanan menjadi faktor penting dalam kepuasan wisatawan.
Kurniawati (2023)	Pantai Pohon Cinta	Strategi ekowisata mangrove	Partisipasi masyarakat dan pemahaman ekowisata perlu ditingkatkan.
Cono et al. (2025)	Pantai Pohon Cinta	Fasilitas wisata dan kepuasan koSnsumen	Fasilitas dan daya tarik destinasi berhubungan dengan kepuasan pengunjung.
Mellyna et al. (2025)	Pantai Karang Jahe	Modal sosial dalam pengelolaan pariwisata	Kepercayaan, norma, dan jejaring sosial menopang pengelolaan wisata berbasis komunitas.
Ningtias et al. (2025)	Pantai Raja Kecik	Modal sosial dalam pengembangan objek wisata	Jaringan dan kepercayaan menjadi kekuatan, sedangkan norma masih perlu diperkuat.
Abdullah dan Rahmatiah (2026)	Kota Gorontalo	Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan	Partisipasi lingkungan muncul melalui gotong royong dan kontrol sosial informal.
Septianda (2023)	Pesisir Tanjungpinang	<i>Good Environmental Governance</i> pengelolaan sampah pesisir	Regulasi dan sanksi formal sering belum konsisten sehingga partisipasi masyarakat tetap penting.
Delisa et al. (2024)	Desa Kuniran	Modal sosial dan partisipasi pembangunan	Modal sosial terbukti berkontribusi pada partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.
Rahman et al. (2025)	Sistem Sosio-Ekologis Pariwisata	<i>Environmental governance</i> untuk wisata berkelanjutan	Tata kelola lingkungan pariwisata bersifat hibrida; kolaborasi multipihak dan kapasitas kelembagaan menjadi kunci.
Wan dan Du (2022)	Masyarakat umum (China)	Modal sosial, pengetahuan lingkungan, dan perilaku pro-lingkungan	Modal sosial (kepercayaan, norma, jaringan, partisipasi) secara signifikan mendorong perilaku pro-lingkungan privat dan publik.
Auliah et al.(2025)	Desa Wisata Bangelan, Indonesia	Modal sosial komunitas dan aksi kolektif dalam pariwisata berkelanjutan	Kepercayaan, jaringan, dan norma memfasilitasi aksi kolektif antara komunitas dan pemerintah untuk pariwisata berkelanjutan.

3.2. Modal Sosial sebagai Kerangka Perilaku Pro-Lingkungan

Hasil sintesis literatur menunjukkan bahwa perilaku pro-lingkungan pada kawasan wisata pesisir tidak cukup dijelaskan hanya melalui tingkat pengetahuan individu. Praktik pengelolaan lingkungan pada destinasi berbasis masyarakat lebih banyak ditentukan oleh kemauan kolektif untuk bekerja sama, kepatuhan terhadap norma yang berlaku, serta keterhubungan dalam jejaring sosial dan kelembagaan. Hal ini sejalan dengan temuan Wan dan Du (2022) yang menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap norma sosial dan tingkat partisipasi sosial yang tinggi meningkatkan kecenderungan individu untuk mengadopsi perilaku pro-lingkungan. Temuan serupa diperoleh Liu et al. (2014) pada konteks ekowisata berbasis komunitas, yang memperlihatkan bahwa modal sosial kognitif memediasi pengaruh manfaat ekonomi terhadap perilaku pro-lingkungan penduduk lokal.

Dalam perspektif modal sosial, kepercayaan berfungsi sebagai pendorong utama penerimaan program bersama, norma sosial menjadi pedoman yang mengarahkan perilaku sesuai kesepakatan kolektif, sedangkan jaringan sosial berperan sebagai media koordinasi, pertukaran informasi, serta akses terhadap sumber daya. Pengelolaan sumber daya pesisir juga dapat dipahami sebagai bagian dari pengelolaan sumber daya bersama

(*common pool resources*), sehingga efektivitas tata kelola sangat bergantung pada keberadaan aturan kolektif dan institusi lokal yang memperoleh legitimasi masyarakat (Ostrom, 1990).

Dalam konteks Pantai Pohon Cinta, berbagai kajian mengenai fasilitas wisata, perencanaan kawasan, pengembangan ekowisata mangrove, serta kepuasan pengunjung menunjukkan bahwa kualitas lingkungan menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan destinasi (Boekoesoe et al., 2023; Kurniawati, 2023; Riadi & Botutihe, 2021; Cono et al., 2025). Namun, kajian-kajian tersebut belum secara rinci menjelaskan mekanisme sosial yang berperan dalam menjaga perilaku pelestarian lingkungan. Oleh sebab itu, temuan dari penelitian mengenai modal sosial pada destinasi wisata pesisir lain, seperti Pantai Karang Jahe dan Pantai Raja Kecil, digunakan sebagai bahan perbandingan.

Pendekatan *environmental governance* yang dikemukakan oleh Rahman et al. (2025) menegaskan bahwa tata kelola lingkungan pada destinasi wisata sebagai sistem sosio-ekologis cenderung bersifat hibrida, yaitu mengintegrasikan peran pemerintah, mekanisme pasar, serta partisipasi masyarakat. Auliah et al. (2025) memperkuat perspektif ini dengan menunjukkan bahwa aksi kolektif berbasis modal sosial, khususnya yang melibatkan kepercayaan dan jaringan antaraktor, menjadi prasyarat bagi keberlanjutan pariwisata di tingkat komunitas. Perspektif ini memperkuat pandangan bahwa keberlanjutan wisata pesisir, termasuk di Pantai Pohon Cinta, memerlukan pendekatan tata kelola terpadu.

Tabel 2. Sintesis Peran Elemen Modal Sosial dalam Perilaku Pro-Lingkungan

Elemen Modal Sosial	Indikasi Temuan Literatur	Implikasi Pro-Lingkungan	Sumber Literatur
Kepercayaan	Kepercayaan antarwarga dan kepada pengelola wisata memudahkan penerimaan program, pembagian tugas, dan kepatuhan terhadap kesepakatan komunitas.	Mendorong kerja kolektif dalam pengurangan sampah, pemeliharaan fasilitas, dan pelestarian mangrove.	(Delisa et al., 2024; Mellyna (2025); Putnam, 1993; Wan & Du, 2022)
Norma sosial	Norma lokal, nilai gotong royong, dan etika keagamaan memberi tekanan sosial agar warga menjaga lingkungan.	Menguatkan kontrol sosial informal ketika sanksi formal belum berjalan konsisten.	(Abdullah & Rahmatiah, 2026; Ningtias et al., 2025; Septianda, 2023)
Jaringan sosial	Hubungan antara Pokdarwis, BUMDes, pemerintah desa, dinas, LSM, dan perguruan tinggi memperluas akses informasi dan sumber daya.	Memperbesar peluang edukasi lingkungan, kampanye bersih pantai, dan penguatan ekowisata berbasis komunitas.	(Auliah et al., 2025; Mellyna et al., 2025; Kurniawati, 2023; Ningtias et al., 2025)
Kearifan lokal Huyula	Huyula sebagai basis budaya menghubungkan norma gotong royong dengan tanggung jawab ekologis masyarakat pesisir.	Menjadikan perilaku menjaga pantai bagian dari identitas sosial masyarakat, bukan sekadar kewajiban administratif.	(Abdullah & Rahmatiah, 2026)
Tata kelola lingkungan (<i>environmental governance</i>)	Tata kelola pada sistem sosio-ekologis pariwisata bersifat hibrida, menggabungkan regulasi, mekanisme pasar, dan partisipasi komunitas.	Memastikan keberlanjutan melalui campuran instrumen yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan.	Rahman et al., (2025)

3.3 Kepercayaan dan Aksi Kolektif Lingkungan

Kepercayaan dipandang sebagai elemen fundamental dalam modal sosial karena memengaruhi tingkat kesediaan individu untuk terlibat dalam aktivitas kolektif. Keberadaan kepercayaan membentuk keyakinan bahwa keterlibatan dalam kegiatan bersama menghasilkan dampak kolektif bagi masyarakat. Delisa et al. (2024) mengemukakan bahwa modal sosial memiliki keterkaitan erat dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Mellyna et al. (2025) menegaskan bahwa kepercayaan yang terbangun antara pengelola, masyarakat, dan pemangku kepentingan menjadi dasar penting dalam pengelolaan Pantai Karang Jahe. Wan dan Du (2022) menambahkan bahwa peningkatan kepercayaan sosial secara khusus berpengaruh

terhadap perilaku pro-lingkungan di ranah privat, seperti penghematan energi dan pemilahan sampah di tingkat rumah tangga.

Dalam konteks Pantai Pohon Cinta, temuan tersebut memberikan implikasi bahwa penguatan kepercayaan terhadap lembaga pengelola menjadi aspek penting. Transparansi dan akuntabilitas yang dijalankan oleh Pokdarwis, BUMDes, serta pemerintah desa dapat memperluas partisipasi masyarakat dalam kegiatan kebersihan lingkungan, pemilahan sampah, pengurangan plastik sekali pakai, hingga pelestarian mangrove. Rahman et al. (2025) juga menekankan bahwa penguatan kapasitas kelembagaan merupakan prasyarat penting dalam mewujudkan tata kelola lingkungan pariwisata yang efektif.

Lebih lanjut, kepercayaan berperan dalam menjembatani kepentingan ekonomi dan ekologis. Pelaku usaha di kawasan wisata akan lebih terdorong menjaga kebersihan lingkungan apabila terdapat keyakinan bahwa kualitas lingkungan yang terjaga meningkatkan kenyamanan pengunjung sekaligus mendukung keberlanjutan usaha mereka. Kondisi ini sejalan dengan kajian kepuasan wisatawan yang menunjukkan bahwa kebersihan dan kualitas lingkungan kawasan berpengaruh terhadap pengalaman berwisata (Riadi & Botutihe, 2021; Cono et al., 2025).

3.4 Norma Sosial, Huyula, dan Kontrol Lingkungan Informal

Norma sosial berfungsi sebagai pedoman yang membedakan perilaku yang dapat diterima dan yang tidak dalam komunitas. Dalam konteks masyarakat pesisir, norma tersebut tercermin dalam larangan membuang sampah sembarangan, kewajiban menjaga fasilitas umum, etika pemanfaatan sumber daya laut, serta dorongan berpartisipasi dalam gotong royong. Pada konteks Gorontalo, nilai Huyula memiliki peran menonjol karena merepresentasikan semangat kebersamaan dan penyelesaian persoalan secara kolektif. Nilai ini memiliki relevansi dengan isu lingkungan karena dapat menjadi landasan budaya dalam membentuk perilaku pro-lingkungan berbasis komunitas.

Sejumlah literatur menunjukkan bahwa kontrol sosial informal cenderung lebih efektif pada komunitas dengan ikatan sosial kuat. Abdullah dan Rahmatiah, (2026) menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan di Leato Utara diwujudkan melalui kontribusi tenaga, penyampaian aspirasi, serta pengawasan informal. Septianda (2023) menemukan bahwa pengelolaan sampah di kawasan pesisir masih menghadapi kendala ketika implementasi tata kelola dan penegakan sanksi belum optimal. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa norma informal belum sepenuhnya menggantikan regulasi formal, namun dapat memperkuat kepatuhan masyarakat ketika aturan formal belum efektif. Rahman et al. (2025) menekankan bahwa efektivitas tata kelola lingkungan di destinasi wisata akan lebih optimal apabila instrumen formal dan informal diterapkan secara terpadu.

Penguatan norma di kawasan Pantai Pohon Cinta dapat dilakukan melalui pengintegrasian nilai Huyula dalam kampanye kebersihan pantai, penyediaan informasi lingkungan, kegiatan berbasis komunitas, serta edukasi bagi generasi muda. Perkembangan sektor pariwisata menuntut upaya menjaga keberlanjutan nilai-nilai lokal, sehingga norma budaya perlu berjalan seiring dengan regulasi formal, penguatan edukasi, serta kejelasan pembagian peran kelembagaan.

3.5 Jaringan Sosial dan Kolaborasi Kelembagaan

Jaringan sosial berperan sebagai penghubung antara aktor-aktor lokal dengan sumber daya yang lebih luas. Dalam pengelolaan wisata pesisir, jejaring ini mencakup hubungan antara Pokdarwis, masyarakat, pelaku usaha, BUMDes, pemerintah desa, dinas pariwisata, dinas lingkungan hidup, LSM, perguruan tinggi, hingga wisatawan. Ningtias et al. (2025) menegaskan bahwa jaringan sosial yang diperkuat oleh kepercayaan menjadi faktor kunci dalam pengembangan destinasi wisata. Kurniawati (2023) menyoroti pentingnya penguatan keterlibatan masyarakat dalam strategi pengembangan ekowisata mangrove di Pantai Pohon Cinta. Auliah et al. (2025) menambahkan bahwa aksi kolektif yang terbangun dari jaringan sosial antaraktor termasuk pemerintah, komunitas, dan pihak swasta merupakan fondasi bagi pencapaian tujuan pariwisata berkelanjutan.

Efektivitas jaringan sosial tidak hanya ditentukan oleh luasnya hubungan antaraktor, tetapi juga oleh kualitas koordinasi. Kajian Jumiati et al. (2024) pada desa wisata di Sumatera Barat menunjukkan bahwa modal sosial dan pariwisata berbasis masyarakat berperan sebagai mediator penting dalam mewujudkan keberlanjutan, sehingga kekuatan jaringan akan optimal apabila ditopang kelembagaan yang kuat. Relasi kelembagaan yang baik dapat mempercepat penyediaan fasilitas pendukung, pelatihan pengelolaan sampah, penerapan kampanye 3R, pendampingan ekowisata, hingga penguatan promosi destinasi wisata. Sebaliknya, koordinasi yang belum terintegrasi berpotensi menimbulkan duplikasi program dan menghambat keberlanjutan kegiatan. Rahman et al. (2025) menekankan bahwa kemitraan multipihak merupakan komponen penting dalam memperkuat tata kelola lingkungan di destinasi wisata.

Konteks Kabupaten Puhwato menunjukkan bahwa Pokdarwis memiliki posisi strategis sebagai simpul utama dalam jaringan lokal. BUMDes berperan memperkuat aspek kelembagaan dan pembiayaan, sedangkan pemerintah desa dan dinas terkait mendukung melalui regulasi dan fasilitas lingkungan. Perguruan tinggi dan LSM berkontribusi dalam edukasi, penelitian, pelatihan, serta evaluasi program. Keterpaduan peran

tersebut menunjukkan bahwa jaringan sosial tidak hanya berfungsi dalam mendorong aktivitas jangka pendek, tetapi juga membentuk sistem kerja yang mendukung perilaku pro-lingkungan di kawasan wisata pesisir.

3.6 Faktor Pendukung dan Penghambat Berdasarkan Literatur

Berdasarkan sintesis literatur, faktor pendukung perilaku pro-lingkungan pada wisata pesisir terutama berkaitan dengan keberadaan nilai lokal, kelembagaan komunitas, manfaat ekonomi pariwisata, dan peluang kolaborasi multipihak. Sementara itu, faktor penghambat muncul dari lemahnya penegakan aturan, keterbatasan literasi lingkungan, kurangnya anggaran, fragmentasi kelembagaan, dan tekanan komersialisasi pariwisata. Faktor-faktor tersebut perlu dicermati secara hati-hati karena berasal dari berbagai konteks penelitian, bukan dari pengukuran lapangan langsung di Pantai Pohon Cinta.

Tabel 3. Faktor Pendukung dan Penghambat Modal Sosial Berbasis Sintesis Literatur

Aspek	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Dasar Literatur
Kepercayaan	Kedekatan sosial masyarakat, transparansi pengelolaan, manfaat ekonomi wisata, reputasi Pokdarwis/BUMDes.	Konflik kepentingan, pengelolaan kurang transparan, kejenuhan partisipasi, ketidakpercayaan pada program eksternal.	(Delisa et al., 2024; Mellyna et al., 2025; Kurniawati, 2023; Wan & Du, 2022)
Norma sosial	Huyula/gotong royong, etika keagamaan menjaga alam, rasa malu ketika merusak fasilitas, kontrol sosial informal.	Sanksi formal lemah, nilai lokal menurun pada generasi muda, perilaku wisatawan sulit dikendalikan, aturan tidak konsisten.	(Abdullah & Rahmatiah, 2026; Ningtias et al., 2025; Septianda, 2023)
Jaringan sosial	Pokdarwis sebagai simpul komunitas, dukungan BUMDes, kolaborasi dinas/LSM/ perguruan tinggi, media sosial untuk kampanye.	Koordinasi lintas sektor lemah, program tidak berkelanjutan, infrastruktur terbatas, ketergantungan pada figur kunci.	(Auliah et al., 2025; Mellyna et al., 2025; Kurniawati, 2023; Ningtias et al., 2025)
Konteks destinasi & <i>environmental governance</i>	Daya tarik wisata, fasilitas yang baik, potensi mangrove, tata kelola hibrida yang memadukan regulasi dan partisipasi.	Sampah pesisir, erosi pantai, kerusakan fasilitas, tekanan kunjungan, keterbatasan sarana kebersihan.	(Boekoesoe et al., 2023; Rahman et al., 2025; Riadi & Botutihe, 2021)

4. KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI

4.1 Kesimpulan

- 1) Hasil sintesis literatur menunjukkan bahwa hubungan antara modal sosial dan perilaku pro-lingkungan pada konteks wisata pesisir bersifat saling memperkuat. Modal sosial yang meliputi kepercayaan, norma, dan jaringan sosial terbukti menjadi faktor penentu dalam membentuk kesediaan masyarakat untuk terlibat dalam praktik pengelolaan lingkungan berbasis komunitas. Kajian-kajian terdahulu dari berbagai konteks destinasi pesisir secara konsisten menunjukkan bahwa perilaku pro-lingkungan tidak dapat dijelaskan semata-mata oleh faktor pengetahuan individu, melainkan sangat dipengaruhi oleh kekuatan relasi sosial, nilai kolektif, dan dukungan kelembagaan (Auliah et al., 2025; Wan & Du, 2022).
- 2) Kepercayaan berperan sebagai fondasi utama yang mendorong keterlibatan masyarakat dalam aksi kolektif lingkungan, terutama melalui transparansi dan akuntabilitas lembaga pengelola seperti Pokdarwis, BUMDes, dan pemerintah desa. Norma sosial, termasuk nilai kearifan lokal Huyula, berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial informal yang mengarahkan perilaku masyarakat pesisir untuk menjaga kebersihan, memelihara fasilitas umum, dan melestarikan ekosistem mangrove. Jaringan sosial yang melibatkan Pokdarwis, pemerintah desa, dinas terkait, LSM, dan perguruan tinggi memperluas akses terhadap pengetahuan, sumber daya, dan peluang kolaborasi.
- 3) Implikasi teoretis bagi penguatan tata kelola wisata pesisir berkelanjutan di Kabupaten Puhwato menunjukkan pentingnya penerapan pendekatan *environmental governance* yang terintegrasi. Pendekatan ini menempatkan pengelolaan lingkungan sebagai hasil sinergi antara kebijakan pemerintah, mekanisme ekonomi, dan partisipasi aktif masyarakat. Secara teoretis, sintesis ini memperluas teori modal sosial Putnam dan Fukuyama dengan menempatkan kearifan lokal Huyula sebagai bentuk modal sosial yang khas secara kultural, sehingga dimensi kepercayaan, norma, dan jaringan tidak dipahami sebagai konsep yang netral budaya, melainkan tertanam dalam

nilai gotong royong masyarakat Gorontalo. Temuan ini sekaligus menegaskan keterhubungan antara teori modal sosial dan kerangka pengelolaan sumber daya bersama Ostrom, yang menempatkan institusi lokal yang berlegitimasi sebagai penentu keberhasilan tata kelola lingkungan. Secara praktis, penguatan modal sosial melalui internalisasi nilai kearifan lokal, pengembangan kolaborasi kelembagaan, serta peningkatan literasi lingkungan menjadi elemen strategis yang dapat diterjemahkan ke dalam program pemerintah daerah, penguatan kapasitas Pokdarwis dan BUMDes, serta perancangan kampanye lingkungan berbasis komunitas dalam mendukung keberlanjutan pengelolaan destinasi wisata pesisir.

- 4) Kajian ini memiliki sejumlah keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam menafsirkan temuannya. Pertama, kesimpulan disusun sepenuhnya berdasarkan data sekunder dari literatur terdahulu, sehingga belum disertai validasi empiris langsung di Pantai Pohon Cinta. Kedua, sebagian literatur perbandingan berasal dari konteks destinasi dan wilayah yang berbeda, sehingga generalisasi temuannya ke kawasan Pohuwato perlu dilakukan secara berhati-hati. Ketiga, keterbatasan jumlah kajian yang secara spesifik membahas modal sosial pada wisata pesisir di Gorontalo menjadikan sintesis ini lebih bersifat konseptual daripada konklusif. Keterbatasan tersebut sekaligus membuka peluang bagi penelitian lanjutan yang berbasis data lapangan.

4.2 Saran/Rekomendasi

- 1) Penguatan kepercayaan masyarakat perlu dilakukan melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, serta komunikasi yang terbuka dalam pengelolaan wisata pesisir oleh Pokdarwis, BUMDes, dan pemerintah desa.
- 2) Integrasi nilai kearifan lokal Huyula dalam program lingkungan, kampanye kebersihan pantai, dan edukasi masyarakat perlu terus dikembangkan sebagai strategi penguatan perilaku pro-lingkungan berbasis budaya.
- 3) Penyusunan dan penegakan aturan formal yang jelas perlu berjalan beriringan dengan penguatan norma sosial agar tercipta kepatuhan yang berkelanjutan terhadap praktik ramah lingkungan.
- 4) Penguatan jaringan sosial dan kolaborasi kelembagaan antaraktor, termasuk pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, dan akademisi, perlu difasilitasi melalui forum koordinasi yang rutin dan terstruktur.
- 5) Pengembangan kapasitas kelembagaan lokal, khususnya Pokdarwis dan BUMDes, perlu didukung melalui pelatihan, pendampingan, serta dukungan kebijakan dari pemerintah daerah.
- 6) Penelitian selanjutnya disarankan untuk melibatkan data lapangan guna menguji secara empiris hubungan antara modal sosial dan perilaku pro-lingkungan pada kawasan wisata pesisir, khususnya di Pantai Pohon Cinta, Kabupaten Pohuwato.

REFERENSI

- Abdullah, D., & Rahmatiah. (2026). Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kelurahan Leato Utara, Kota Gorontalo. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 5(1), 1315–1326. <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS/article/view/5538>
- Auliah, A., Prayitno, G., Ari, I. R. D., Adrianto, D. W., Subagiyo, A., Biloshkurska, N. V., & Ismaili, H. (2025). The Role of Community Social Capital and Collective Action in the Development of Sustainable Tourism. *International Social Science Journal*, 75(256), 311–325. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/issj.12554>
- Boekoesoe, B., Syukri, M. R., & Djailani, Z. (2023). Penerapan Arsitektur Tropis Pada Hotel Resort Di kawasan Pantai Pohon Cinta. *JAMBURA Journal of Architecture*, 5(1), 87–91. <https://doi.org/10.37905/jjoa.v5i1.20516>
- Catton J. R., William R., & Dunlap, Riley E. (1980). A New Ecological Paradigm for Post-Exuberant Sociology. *American Behavioral Scientist*, 24(1), 15–47. <https://doi.org/10.1177/000276428002400103>
- Cono, T. H. M., Ramadhani, B. S., & Laginda, S. (2025). Pengaruh Fasilitas Wisata terhadap Kepuasan Konsumen di Pantai Pohon Cinta Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato. *TOBA: Journal of Tourism, Hospitality, and Destination*, 4(2), 152-157. <https://doi.org/10.55123/toba.v4i2.5467>
- Delisa, A. D., Prayitno, G., & Wicaksono, A. D. (2024). Keterkaitan Modal Sosial Dengan Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Desa Kuniran. *Tata Kota Dan Daerah*, 16(2), 155–164. <https://doi.org/10.21776/ub.takoda.2024.016.02.4>
- Fukuyama, F. (2001). Social capital, civil society and development. *Third World Quarterly*, 22(1), 7–20. <https://doi.org/10.1080/713701144>
- Jumiati, J., Saputra, B., Frinaldi, A., & Putri, N. E. (2024). Examining the Mediating Effects of Social Capital and Community-Based Tourism on the Role of Tourism Villages in Sustainable Tourism. *Journal of Environmental Management and Tourism; Vol 15 No 1 (2024): JEMT, Volume XV, Issue 1(73), Spring 2024*. [https://doi.org/10.14505/jemt.v15.1\(73\).15](https://doi.org/10.14505/jemt.v15.1(73).15)

- Kollmuss, A., & Agyeman, J. (2002). Mind the Gap: Why do people act environmentally and what are the barriers to pro-environmental behavior? *Environmental Education Research*, 8(3), 239–260. <https://doi.org/10.1080/13504620220145401>
- Kurniawati, N. (2023). Strategi Ekowisata Mangrove Pantai Pohon Cinta Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo. *TOBA: Journal of Tourism, Hospitality and Destination*, 2(3), 50–55. <https://doi.org/10.55123/toba.v2i3.3201>
- Liu, J., Qu, H., Huang, D., Chen, G., Yue, X., Zhao, X., & Liang, Z. (2014). The role of social capital in encouraging residents' pro-environmental behaviors in community-based ecotourism. *Tourism Management*, 41, 190–201. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.tourman.2013.08.016>
- Luo, X., Xu, H., & Wall, G. (2025). Collective actions and crisis adaptation of a rural tourism community. *Journal of Sustainable Tourism*, 33(11), 2396–2415. <https://doi.org/10.1080/09669582.2025.2480848>
- Mellyna, Anggie, Malik, A. (2025). Modal Sosial dalam Pengelolaan Pariwisata Pantai Karang Jahe, Desa Punjulharjo, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang. *Jendela PLS*, 10(2), 272–283. <https://jurnal.unsil.ac.id/index.php/jpls/article/view/17273>
- Ningtias, A., Jalil, A., & Sidiq, R. S. S. (2025). Modal Sosial dalam Pengembangan Objek Wisata Pantai Raja Kecil di Desa Muntai Barat Kecamatan Bantan. *ETNOREFLIKA: Jurnal Sosial Dan Budaya*, 14(1), 95–102. <https://doi.org/10.33772/etnoreflika.v14i1.2885>
- Ostrom, E. (1990). *Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511807763>
- Putnam, R. D. (1993). *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*. Princeton University Press.
- Rahman, S. M., Lihawa, F., & K. Baderan, D. W. (2025). Environmental Governance for Sustainable Tourism in Socio-Ecological Systems: A Systematic Literature Review. *West Science Interdisciplinary Studies*, 3(12), 2289–2298. <https://doi.org/10.58812/wsis.v3i12.2499>
- Riadi, A., & Botutihe, M. H. (2021). Visitor satisfaction prediction of the “Pantai Pohon Cinta” beach tourism using the backpropagation algorithm with particle swarm optimization feature selection. *ILKOM Jurnal Ilmiah*, 13(2), 117–124. <https://doi.org/10.33096/ilkom.v13i2.791.117-124>
- Septianda, V. Y. M. F. (2023). Penerapan Prinsip Good Environmental Governance dalam Pengelolaan Sampah Pesisir di Pelantar II Kota Tanjungpinang Tahun 2023. *Jurnal Pemerintahan Dan Kebijakan (JPK)*, (Vol 5, No 1 (2023): December), 17–29. <https://journal.umy.ac.id/index.php/jpk/article/view/19026/8767>
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- Stern, P. C. (2000). New Environmental Theories: Toward a Coherent Theory of Environmentally Significant Behavior. *Journal of Social Issues*, 56(3), 407–424. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/0022-4537.00175>
- Tuhumury, N. C., & Kaliky, I. (2019). Identifikasi Sampah Pesisir Di Desa Rumah Tiga Kota Ambon. *TRITON: Jurnal Manajemen Sumberdaya Perairan*, 15(1), 30–39. <https://doi.org/10.30598/tritonvol15issue1page30-39>
- Wan, Q., & Du, W. (2022). Social Capital, Environmental Knowledge, and Pro-Environmental Behavior. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(3). <https://doi.org/10.3390/ijerph19031443>